

Research Article

Family Development in Islam: The Foundation for Building a Sakinah, Mawaddah, and Rahmah Household

Bina Prima Panggayuh

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: binaprimapanggayuh@unj.ac.id

Rezy Az Zahra

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: rezy_1404625070@mhs.unj.ac.id

Dhia A'isy Putri

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: dhia_1404625022@mhs.unj.ac.id

Kahleil Ryner Muharam

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: kahleil_1410625051@mhs.unj.ac.id

Muhammad Alhamrah Adam

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: muhammad_1410625077@mhs.unj.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Quality, Journal of Education, Arabic and Islamic Studies.

Received : December 25, 2025

Revised : January 15, 2026

Accepted : January 30, 2026

Available online : February 26, 2026

How to Cite: Bina Prima Panggayuh, Rezy Az Zahra, Dhia A'isy Putri, Kahleil Ryner Muharam, & Muhammad Alhamrah Adam. (2026). Family Development in Islam: The Foundation for Building a Sakinah, Mawaddah, and Rahmah Household. *Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 4(1), 59-71. <https://doi.org/10.58355/qwt.v4i1.136>

Abstract

This study examines the role of Islamic-based family building in shaping households characterized by sakinah, mawaddah, wa rahmah in Indonesia. Through literature review of official national data and governmental policies principally from Statistics Indonesia (BPS) and the National Population and Family

Planning Agency (BKKBN) the study evaluates family indicators (marriage, divorce, contraceptive participation) and the implementation of family building programs (family registration, premarital counseling, SIGA data system). The findings indicate that comprehensive family programs and data systems have the potential to support household resilience and quality. However, variation in access, socio-economic challenges, and suboptimal program reach suggest the need to strengthen faith-based and policy-based family building. Recommendations include reinforcing data-service integration, expanding the coverage of premarital counseling, and continuous evaluation to realize households of sakinah, mawaddah and rahmah.

Keywords: Family Guidance, Sakinah Family, Pre-Marital Guidance, BKKBN, KUA.

Pembinaan Keluarga Dalam Islam: Fondasi Membangun Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di Indonesia. Melalui kajian literatur terhadap data resmi nasional serta kebijakan pemerintah khususnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) penelitian mengevaluasi trend indikator keluarga (nikah, cerai, kepesertaan KB), serta implementasi program pembinaan keluarga (pendataan keluarga, bimbingan pra-nikah, data SIGA). Hasil menunjukkan bahwa keberadaan program pembinaan dan data keluarga komprehensif memiliki potensi mendukung terciptanya ketahanan dan kualitas rumah tangga. Namun, variasi akses, tantangan sosio-ekonomi, dan kurang optimalnya penetrasi program menunjukkan bahwa pembinaan keluarga berbasis agama dan kebijakan perlu diperkuat. Rekomendasi mencakup penguatan integrasi data-pelayanan keluarga, peningkatan cakupan bimbingan pra-nikah, serta evaluasi berkelanjutan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci: Pembinaan Keluarga, Keluarga Sakinah, Bimbingan Pra-Nikah, BKKBN, KUA.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit paling dasar dalam masyarakat dan memiliki peranan strategis dalam pembentukan moral, sosial, serta keberlanjutan generasi. Dalam ajaran Islam, idealitas rumah tangga diwujudkan melalui prinsip sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih sayang yang melimpah). Namun di era *modern*, dinamika sosial-ekonomi, urbanisasi, serta perubahan nilai telah memunculkan tantangan baru bagi stabilitas keluarga. Di Indonesia, perubahan gaya hidup dan prioritas generasi muda turut

mempengaruhi kecenderungan penundaan menikah atau pilihan tidak menikah yang tercermin dari penurunan angka pernikahan nasional. Sementara itu, meski pernikahan menurun, angka perceraian tetap menunjukkan angka yang signifikan, menandakan bahwa banyak pasangan menikah tetapi tidak memperoleh ketahanan rumah tangga yang diharapkan.

Dalam konteks tersebut, upaya pembinaan keluarga menjadi penting untuk menjembatani nilai agamawi dengan realitas sosial. Pemerintah melalui BKKBN telah menempuh berbagai langkah seperti pendataan keluarga secara menyeluruh, pemutakhiran data keluarga, serta integrasi data melalui sistem informasi keluarga upaya yang diharapkan dapat mendukung program pembangunan keluarga secara terpadu. Dengan latar ini, penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi keluarga di Indonesia berdasarkan data resmi, menganalisis mekanisme dan kebijakan pembinaan keluarga yang dijalankan pemerintah, serta mengevaluasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai nilai-nilai Islam.

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam struktur masyarakat manapun, keluarga berfungsi sebagai ruang utama pembentukan identitas, pendidikan nilai, reproduksi sosial, dan penguatan ketahanan psikologis individu. Dalam perspektif Islam, kedudukan keluarga bahkan lebih tinggi daripada sekadar institusi sosial, karena ia dipandang sebagai bagian integral dari ibadah, implementasi syariat, dan manifestasi maqāṣid al-sharī'ah khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifz al-nasl), menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga jiwa. Oleh sebab itu, pembinaan keluarga dalam Islam bukan hanya menyasar kemampuan teknis menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi juga bertujuan membangun keluarga yang harmonis, kokoh, dan diliputi nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai cita-cita ideal kehidupan berumah tangga.

Namun, dalam konteks sosial Indonesia kontemporer, berbagai dinamika demografis, ekonomi, budaya, dan teknologi telah membawa tantangan baru bagi institusi keluarga. Perubahan gaya hidup, pergeseran prioritas generasi muda, tekanan ekonomi, urbanisasi, serta penetrasi teknologi digital membuat konsep keluarga tradisional mengalami transformasi signifikan. Salah satu indikator paling jelas dari perubahan ini dapat dilihat dari menurunnya angka pernikahan nasional dalam satu dekade terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jika pada awal 2010-an angka pernikahan masih berada pada kisaran 2 juta per tahun, tren 2021–2023 menunjukkan penurunan stabil hingga mencapai 1.577.255 pada tahun 2023. Penurunan ini menandakan bahwa keputusan menikah kini semakin dipengaruhi oleh faktor rasional seperti kesiapan finansial, kestabilan karier, dan kesiapan psikologis, bukan hanya faktor budaya atau ekspektasi sosial.

Di sisi lain, angka perceraian yang tetap tinggi meskipun mengalami penurunan dari 516.334 kasus pada 2022 menjadi 463.654 pada 2023 menunjukkan bahwa banyak pasangan mengalami kesulitan mempertahankan stabilitas rumah tangga. Rasio perceraian yang mencapai sekitar 29,4% terhadap total pernikahan pada tahun yang sama menandakan bahwa hampir sepertiga pasangan

menghadapi konflik yang tidak dapat diselesaikan. Penyebab dominan perceraian seperti perselisihan berkelanjutan, ketidakcocokan karakter, tekanan ekonomi, serta rendahnya literasi komunikasi dan literasi keuangan menjadi indikator bahwa pembinaan keluarga di Indonesia masih memiliki celah signifikan.

Dalam konteks inilah, pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga mengembangkan kebijakan dan program pembinaan keluarga. BKKBN menjalankan pendataan dan pemetaan keluarga secara nasional untuk memahami tingkat kerentanan keluarga. Program ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Pemutakhiran Data Keluarga 2023, yang berhasil menghimpun sekitar 15,9 juta data keluarga dengan berbagai indikator sosial, ekonomi, kesehatan, hingga kerentanan. Data ini terintegrasi dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA), yang diharapkan menjadi landasan perencanaan program pembangunan keluarga secara lebih akurat.

Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) memegang peran sentral dalam pembinaan pra-nikah melalui program Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi langsung pemerintah terhadap kesiapan pasangan dalam berumah tangga. Namun, implementasinya acap kali menghadapi tantangan belum meratanya kualitas instruktur, keterbatasan waktu pembinaan, hingga materi pembinaan yang cenderung teoritis dan kurang menyentuh aspek praktis seperti manajemen konflik, komunikasi, pengasuhan, dan perencanaan keuangan keluarga.

Dalam perspektif Islam, pembinaan keluarga memiliki landasan kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditunjukkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bukan hanya menjadi simbol romantis, tetapi merupakan tujuan fungsional dari pernikahan itu sendiri. Islam menekankan pentingnya peran keluarga sebagai tempat tumbuhnya ketenangan (sakinah), sumber kasih sayang dan cinta yang aktif (mawaddah), serta limpahan rahmat dan empati (rahmah) sebagai fondasi interaksi suami istri. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya akhlak, komunikasi yang baik, tanggung jawab nafkah, dan kepemimpinan keluarga yang seimbang antara kemampuan spiritual dan kecakapan sosial. Pembinaan keluarga yang baik seharusnya dapat membantu pasangan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai teori.

Sayangnya, di tengah kompleksitas modern, pembinaan keluarga yang berbasis nilai-nilai spiritual sering kali belum terintegrasi secara memadai dengan pendekatan sosial-psikologis dan ekonomi. Akibatnya, pembinaan keluarga sering kali menjadi normatif dan religius, tetapi kurang operasional dalam memberikan keterampilan konkrit kepada pasangan. Padahal, tantangan keluarga modern tidak hanya mengenai implementasi nilai agama, tetapi juga menyangkut dinamika emosional, manajemen waktu, pengelolaan konflik, dan adaptasi terhadap lingkungan sosial yang terus berubah.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan ketahanan keluarga juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan struktural. Data BKKBN menunjukkan bahwa banyak keluarga berada pada kondisi kerentanan ekonomi, rendahnya pendidikan, ketidakstabilan pekerjaan, hingga risiko stunting pada anak. Faktor-

faktor ini secara langsung dan tidak langsung memengaruhi stabilitas rumah tangga. Rumah tangga dengan kerentanan ganda lebih rentan mengalami perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketegangan psikologis antaranggota keluarga. Oleh karena itu, pembinaan keluarga berbasis Islam tidak dapat hanya berfokus pada aspek spiritual semata, tetapi harus diperkuat dengan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan keterampilan ekonomi, pemberdayaan perempuan, perencanaan keuangan keluarga, serta penguatan fungsi peran suami dan istri yang saling melengkapi.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut melalui analisis komprehensif terhadap dinamika keluarga di Indonesia menggunakan data resmi terbaru, sambil menempatkan nilai-nilai Islam sebagai kerangka evaluatif utama. Dengan menggabungkan pendekatan data empiris dan nilai-nilai keislaman, penelitian ini menawarkan pemahaman lebih mendalam mengenai kondisi keluarga Indonesia, tantangan pembinaan keluarga, serta strategi efektif yang dapat dilakukan pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana kebijakan dan program pembinaan keluarga saat ini dapat dimaksimalkan melalui integrasi data dan peningkatan kapasitas pembinaan, serta bagaimana nilai Islam dapat diterjemahkan menjadi pendekatan praksis yang relevan dengan konteks modern. Hal ini selaras dengan upaya aktualisasi maqāṣid al-usrah (tujuan-tujuan keluarga) yang tidak hanya berfokus pada keberlangsungan hubungan suami istri, tetapi juga kesejahteraan psikososial seluruh anggota keluarga serta terciptanya generasi yang berkarakter dan berdaya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga secara praktis, terutama dalam rangka membantu pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan ulang strategi pembinaan keluarga yang lebih berbasis bukti (evidence-based), adaptif, dan kontekstual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam wacana penguatan keluarga di Indonesia, terutama dalam menyongsong bonus demografi, tuntutan digitalisasi, dan tantangan sosial-ekonomi masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*), dengan analisis data sekunder dari publikasi dan laporan resmi lembaga terkait. Sumber utama meliputi data statistik dari BPS terkait pernikahan dan perceraian serta dokumentasi program dan kebijakan keluarga dari BKKBN, termasuk pemutakhiran data keluarga 2023 dan implementasi sistem informasi keluarga (SIGA).

Teknik analisis meliputi, pertama, ringkasan dan sintesis data kuantitatif dari publikasi resmi untuk menggambarkan tren indikator keluarga (nikah, cerai, data keluarga). Kedua, analisis kebijakan program pembinaan keluarga: bagaimana data keluarga digunakan sebagai dasar perencanaan dan intervensi, serta sejauh mana sistem SIGA dioptimalkan untuk mendukung tujuan pembangunan keluarga. Ketiga, interpretasi kerangka nilai Islam (sakinah,

mawaddah, wa rahmah) sebagai landasan *normative* untuk mengevaluasi relevansi program pembinaan terhadap ideal rumah tangga.

Metodologi ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dan literatur publik, penelitian ini tidak menggali data primer seperti survei atau wawancara dengan keluarga. Oleh karena itu perspektif subyektif tentang efektivitas program di tingkat keluarga individual tidak tercakup analisis lebih bersifat makro-kebijakan dan tren.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) yang dipilih karena relevan untuk menganalisis fenomena sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga dalam konteks Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghimpun, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber data dan literatur ilmiah yang kredibel untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kondisi keluarga, implementasi kebijakan, serta relevansi nilai-nilai Islam dalam pembinaan keluarga.

Metodologi ini berfokus pada data sekunder yang berasal dari sumber-sumber resmi pemerintah, publikasi statistik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, kebijakan publik, serta dokumen pemikiran keislaman klasik maupun kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan evaluatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data tahun 2023 mengenai dinamika keluarga di Indonesia memberikan gambaran yang kaya namun juga kompleks mengenai kondisi sosial masyarakat saat ini. Dengan tercatatnya 1.577.255 pernikahan angka yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dan 463.654 kasus perceraian meskipun menurun dari 516.344 pada 2022 statistik ini bukan sekadar deretan angka, melainkan indikator vital dari perubahan nilai, tantangan ekonomi, dan efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan keluarga. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami implikasi dari tren ini, peran kebijakan berbasis data oleh BKKBN, dan kebutuhan mendesak akan integrasi menyeluruh dalam pembinaan keluarga.

Penurunan Angka Pernikahan: Cerminan Kesiapan Multidimensi

Penurunan angka pernikahan secara fundamental mencerminkan adanya pergeseran prioritas yang signifikan di kalangan generasi muda Indonesia. Fenomena ini tidak boleh diartikan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan sebagai keputusan yang semakin rasional dan hati-hati dalam menghadapi realitas sosial-ekonomi kontemporer. Faktor stabilitas ekonomi menjadi penentu utama. Tingginya biaya hidup, kesulitan mendapatkan pekerjaan formal yang berkelanjutan, dan melonjaknya harga properti, terutama di pusat-pusat pertumbuhan, memaksa calon pasangan menunda pernikahan hingga mereka mencapai keamanan finansial tertentu. Menikah tanpa fondasi ekonomi yang kuat dipandang sebagai risiko besar yang dapat memicu konflik dan berujung pada perceraian. Penundaan ini adalah strategi pertahanan yang

bertujuan untuk mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap tekanan finansial di masa depan. Lebih dari itu, generasi muda kini semakin menyadari bahwa pernikahan memerlukan kesiapan non materi yang mencakup kematangan mental, emosional, dan, yang sangat ditekankan, kesiapan spiritual. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mencari bekal ilmu dan pembinaan diri yang lebih mendalam sebelum berani melangkah ke jenjang yang dianggap sakral, menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab personal terhadap keberlangsungan rumah tangga yang akan dibangun.

a. Data dan Pengolahan

Pada tahap awal, data jumlah pernikahan tahun 2021–2023 dihimpun dari Statistik Pernikahan BPS. Setelah dilakukan *cleaning* dan *normalization*, data menunjukkan:

Tabel 1. Data Jumlah Pernikahan Tahun 2021–2023

Tahun	Pernikahan	Perubahan (%)
2021	±1,8 juta	–
2022	±1,7 juta	–5–6%
2023	1.577.255	–7%

Tren penurunan yang cukup stabil ini divisualisasikan melalui analisis tren 3 tahun (2021–2023) dan memperlihatkan pola konsisten: turunnya angka pernikahan berbanding lurus dengan perubahan indikator ekonomi nasional (inflasi, biaya hidup) dan indikator ketenagakerjaan (tingkat pengangguran muda).

b. Temuan Analitis

Melalui *cross-analysis* antara data makro ekonomi dan angka pernikahan:

1. Inflasi rata-rata 2022–2023 yang cukup tinggi berdampak langsung pada penundaan menikah.
2. Upah riil yang tidak meningkat signifikan memberikan tekanan pada generasi muda untuk menunda komitmen finansial jangka panjang seperti pernikahan.
3. Kenaikan harga properti di daerah urban sebesar >7% per tahun (berdasarkan indeks harga properti Bank Indonesia) memperkuat fenomena *delayed marriage*.

Dengan demikian, penurunan pernikahan tidak dapat ditafsirkan sebagai pergeseran nilai ke arah apatisme terhadap lembaga keluarga,

Tingkat Perceraian yang Signifikan: Alarm Kerapuhan Rumah Tangga

Meskipun angka perceraian tahun 2023 menunjukkan penurunan, jumlahnya yang mencapai hampir setengah juta kasus merupakan alarm keras

bagi stabilitas sosial. Rasio perceraian terhadap pernikahan dalam satu tahun memberikan indikasi adanya kerapuhan yang meluas dalam sistem ketahanan keluarga. Data empiris menunjukkan bahwa masalah utama perceraian di Indonesia, selain faktor ekonomi, didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakar pada ketidakmampuan pasangan mengelola ekspektasi, perbedaan karakter, dan komunikasi yang buruk.

Hal ini secara langsung menunjuk pada kegagalan sistem pembinaan pra-nikah dan pasca-nikah yang ada. Pembinaan yang ideal harusnya membekali pasangan dengan *life skills* penting, seperti manajemen konflik, literasi keuangan bersama, dan keterampilan *parenting* yang efektif. Prevalensi perceraian yang tinggi ini mengindikasikan bahwa proses pembinaan, seperti *counseling* atau kursus calon pengantin (*suscatin*) yang diwajibkan, di banyak kasus mungkin masih bersifat administratif dan belum mampu menanamkan keterampilan inti yang dibutuhkan untuk mempertahankan rumah tangga dalam jangka panjang.

a. Data dan Pengolahan

Data perceraian 2023 (463.654 kasus) dianalisis menggunakan metode *ratio per 100 marriages*:

Rasio Perceraian = $463.654 : 1.577.255 \times 100 = 29.4\%$

Artinya, setiap 100 pernikahan pada tahun yang sama, terdapat sekitar 29 kasus perceraian angka yang cukup tinggi untuk konteks Asia Tenggara. Melalui kategorisasi penyebab perceraian (BPS), dilakukan *frequency analysis*, menemukan bahwa:

1. 42%: perselisihan terus-menerus
2. 27%: faktor ekonomi
3. 10-12%: meninggalkan salah satu pihak
4. 5%: kekerasan rumah tangga
5. sisanya: masalah moral, gangguan pihak ketiga, dan penyakit

b. Interpretasi

Dari sudut pandang pembinaan keluarga Islami, temuan ini menegaskan:

1. Keterampilan manajemen konflik rumah tangga rendah → ini sejalan dengan dominasi penyebab "perselisihan terus-menerus".
2. Literasi keuangan rumah tangga masih rendah → diperkuat oleh data BPS yang menunjukkan 27% perceraian terkait ekonomi.
3. Kegagalan mekanisme pencegahan konflik struktural → seperti pembinaan pra-nikah dan layanan mediasi KUA.

Peran Strategis BKKBN dan Kebijakan Berbasis Data

Di tengah dinamika sosial ini, BKKBN telah mengambil peran sentral dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kebijakan berbasis data. Pemutakhiran data keluarga tahun 2023 yang melibatkan sekitar 15,9 juta data keluarga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan informasi akurat sebagai fondasi perencanaan program. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dan intervensi program baik itu terkait kesehatan reproduksi, *stunting*, kependudukan, maupun pembangunan sosial dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lapangan. Sistem Informasi Keluarga

(SIGA) yang diperkuat menjadi instrumen kunci dalam strategi ini. SIGA dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar *database*; ia harus berfungsi sebagai alat diagnostik yang mampu memetakan tingkat kerentanan sebuah keluarga. Melalui SIGA, pemerintah idealnya dapat mengidentifikasi keluarga yang memiliki risiko tinggi perceraian, keluarga dengan risiko *stunting* pada anak, atau keluarga yang membutuhkan pelatihan keterampilan ekonomi, sehingga intervensi yang diberikan bersifat preventif dan kuratif secara bersamaan.

a. Proses Pengolahan Data SIGA

BKKBN melalui Pemutakhiran Data Keluarga 2023 mengumpulkan 15,9 juta entri data keluarga. Pengolahan data dilakukan melalui:

1. Validasi berlapis tingkat RT/RW → desa → kecamatan → kabupaten → provinsi
2. Pemutakhiran identitas keluarga
3. Klasifikasi keluarga berdasarkan 7 indikator kerentanan, seperti:
 - a) status ekonomi,
 - b) status pendidikan anggota keluarga,
 - c) kesehatan reproduksi,
 - d) potensi *stunting*,
4. kerukunan rumah tangga.
Integrasi dengan sistem data nasional lainnya seperti:
 - a) DTKS Kemensos,
 - b) Pusdatin Kemendagri,
 - c) data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

b. Analisis Hasil Integrasi

Melalui *data mapping*, SIGA dapat memetakan:

1. Wilayah dengan risiko perceraian tinggi (korelasi signifikan antara perceraian dan kemiskinan).
2. Wilayah dengan risiko *stunting* tinggi (berkaitan dengan keterbatasan akses gizi dan pendidikan keluarga).
3. Keluarga dengan kerentanan ekonomi ekstrem (berpotensi menunda pernikahan).

Namun, *celah krusialnya* adalah minimnya publikasi outcome. SIGA belum mempublikasikan apakah rumah tangga yang menerima intervensi (parenting, konseling ekonomi, edukasi reproduksi) memiliki penurunan risiko perceraian.

Tantangan Kuantifikasi Outcome dan Evaluasi Program

Meskipun investasi besar telah dilakukan pada pemutakhiran data SIGA, tantangan nyata yang dihadapi adalah keterbatasan publikasi hasil jangka panjang (*outcome*). Keberhasilan sebuah program tidak dapat diukur hanya dari jumlah keluarga yang terdaftar atau jumlah *counseling* yang diberikan (*output*), melainkan dari dampak nyata (*impact*) yang ditimbulkannya. Ketiadaan data publik yang jelas mengenai apakah keluarga yang terdaftar di SIGA dan yang secara aktif mengikuti program pembinaan (misalnya, *suscatin* atau sekolah *parenting*)

memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan kelompok *kontrol* adalah kelemahan fundamental dalam sistem evaluasi saat ini.

Tanpa bukti dampak yang kuat, legitimasi dan efektivitas program-program pencegahan kerentanan keluarga menjadi sulit dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, BKKBN dan kementerian terkait (seperti Kemenag) perlu segera merumuskan dan menerapkan sistem *Monitoring and Evaluation* (M&E) yang ketat, yang fokus pada indikator kinerja kunci (KPI) berbasis *outcome*. Pengukuran ini harus komparatif dan transparan, sehingga memungkinkan kebijakan berikutnya dibangun di atas keberhasilan yang terbukti dan kegagalan yang dipelajari.

Pengolahan data kebijakan saat ini masih fokus pada output, bukan outcome.

Tabel 2. Pengolahan Data Kebijakan

Jenis Pengukuran	Apa yang Diukur?	Status Saat Ini
Outcome	apakah SIGA mengurangi risiko stunting?	Tidak jelas
Outcome	apakah suscatin menurunkan perceraian?	Tidak tersedia
Outcome	efektivitas intervensi per wilayah	Tidak dipublikasikan
Output	jumlah keluarga terdaftar SIGA	Ada
Output	jumlah peserta suscatin	Ada

Tanpa pengukuran outcome, tidak ada *feedback loop* untuk memvalidasi apakah kebijakan benar-benar memberikan dampak jangka panjang.

Kesenjangan Kualitas Pembinaan dan Kebutuhan Integrasi Kurikulum

Insidensi perceraian yang tinggi juga menggarisbawahi adanya kesenjangan yang signifikan dalam kualitas dan aksesibilitas pembinaan keluarga. Program *counseling* pra-nikah di banyak daerah seringkali terkesan tergesa-gesa atau hanya formalitas belaka, gagal membekali calon pasangan dengan keterampilan psikososial yang memadai. Kurikulum pembinaan yang efektif harus mampu menyentuh tiga dimensi penting: spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara spiritual, pembinaan harus menanamkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dalam pernikahan, menekankan kesabaran, komitmen, dan tujuan *sakinah*.

Secara sosial, pembinaan harus mengajarkan teknik komunikasi non-kekerasan, resolusi konflik yang konstruktif, dan pembagian peran yang adil di dalam rumah tangga. Secara ekonomi, pembinaan harus mencakup literasi keuangan praktis, perencanaan anggaran, dan pemahaman tentang risiko utang. Saat ini, sering terjadi disproporsi, di mana aspek spiritual mendominasi namun

aspek keterampilan praktis (sosial dan ekonomi) terabaikan, padahal faktor praktis inilah yang sering menjadi pemicu keretakan rumah tangga sehari-hari. Dari pengolahan data kualitas layanan pembinaan keluarga (Kemenag BKKBN):

- a. 37% KUA di Indonesia masih kekurangan konselor tersertifikasi.
- b. Pembinaan pra-nikah banyak dilakukan hanya 1–2 hari (ideal 24–32 jam).
- c. Kurikulum didominasi materi fikih (60%), sementara keterampilan praktis hanya 20–25%.

Mewujudkan Ideal Keluarga Islami dalam Konteks Kontemporer

Untuk mengatasi kompleksitas ini, penyatuan antara nilai agama, kebijakan berbasis data, dan program pembinaan harus diwujudkan dalam strategi nasional yang terintegrasi. Ideal keluarga Islami yang menekankan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) harus diterjemahkan menjadi seperangkat target program yang realistis dan terukur. Integrasi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, di mana BKKBN (dengan data SIGA-nya) berkolaborasi erat dengan Kementerian Agama (sebagai pelaksana *suscatin*) dan Kementerian Sosial (untuk intervensi ekonomi keluarga rentan).

Data dari SIGA harus mengidentifikasi area-area di mana intervensi spiritual atau ekonomi paling dibutuhkan, dan program *suscatin* harus dijamin kualitasnya melalui standarisasi kurikulum dan pelatihan konselor yang berkelanjutan. Transformasi ini akan memungkinkan pemerintah tidak hanya merespons krisis (perceraian atau *stunting*) tetapi juga berinvestasi dalam pencegahan struktural, menghasilkan generasi keluarga yang lebih mandiri, stabil, dan tangguh menghadapi tantangan sosial-ekonomi abad ke-21.

Agar pembinaan keluarga menjadi efektif, penelitian ini menemukan pentingnya:

- a. KUA menggunakan dashboard SIGA untuk mengidentifikasi kebutuhan calon pengantin
 1. Calon berasal dari keluarga risiko ekonomi → fokus literasi finansial
 2. bila berasal dari daerah konflik rumah tangga tinggi → fokus manajemen konflik
- b. Standarisasi kurikulum nasional pembinaan keluarga
- c. Pelatihan konselor berbasis kompetensi psikososial
- d. Evaluasi outcome 6 bulan dan 12 bulan pasca pernikahan

Kesimpulan dan Langkah ke Depan yang Mendesak

Data dinamika keluarga 2023 adalah panggilan bagi pemangku kepentingan untuk bertindak lebih tegas dan terarah. Meskipun terjadi penurunan pada angka pernikahan dan perceraian, tantangan yang tersisa menuntut reformasi dalam sistem pembinaan dan evaluasi program. Penurunan pernikahan menuntut penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda; sementara tingginya angka perceraian menuntut revitalisasi kurikulum pembinaan pra-nikah yang lebih fokus pada keterampilan *soft skills* dan literasi keuangan. Akhirnya, kunci untuk mencapai efektivitas adalah transparansi data *outcome*. Pemerintah harus berani memublikasikan hasil jangka panjang dari program berbasis SIGA

untuk membuktikan dampak positifnya. Hanya melalui penyatuan antara nilai spiritual yang kuat, kebijakan yang didukung bukti empiris, dan program pembinaan yang komprehensif (meliputi aspek spiritual, sosial, dan ekonomi), cita-cita untuk membangun ketahanan keluarga yang stabil dan ideal di Indonesia dapat diwujudkan secara realistis dan berkelanjutan.

Data 2023 memberikan gambaran bahwa:

- a. Penurunan pernikahan → dampak ekonomi dan perubahan perilaku.
- b. Rasio perceraian tinggi → pembinaan pra-nikah belum efektif.
- c. SIGA sudah kuat sebagai data, tetapi belum kuat sebagai alat evaluasi outcome.
- d. Integrasi pembinaan keluarga membutuhkan sinkronisasi Kemenag BKKBN Kemensos berbasis data kerentanan.

KESIMPULAN

Pembinaan keluarga berdasarkan nilai Islam dengan tujuan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah memiliki landasan normatif dan strategis dalam konteks Indonesia sekarang. Upaya pemerintah melalui BKKBN dalam pemutakhiran data keluarga dan sistem SIGA menunjukkan komitmen terhadap pembangunan keluarga berbasis data. Namun data sosial menunjukkan bahwa penurunan pernikahan dan tingginya angka perceraian tetap menjadi tantangan.

Untuk mendekatkan kondisi keluarga di Indonesia pada idealitas Islam, dibutuhkan: integrasi antara data keluarga, kebijakan keluarga, dan program pembinaan (pra-nikah, parenting, ekonomi, kesehatan) peningkatan akses dan cakupan layanan pembinaan serta evaluasi hasil (*outcome*) secara berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek spiritual-agama, psikologi, sosial, dan ekonomi pembinaan keluarga dapat berfungsi sebagai fondasi membangun keluarga yang stabil, harmonis, dan sesuai nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Nilai-nilai Islam dalam konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah sangat relevan untuk dijadikan landasan normatif bagi pembinaan keluarga. Islam memberikan prinsip dasar yang meliputi keadilan peran suami-istri, komunikasi yang baik, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab nafkah yang proporsional, serta pendidikan moral bagi anak. Namun, nilai-nilai ini harus diterjemahkan menjadi program pembinaan yang operasional. Integrasi antara prinsip keagamaan dengan pendekatan psikologi modern, teori ketahanan keluarga, dan strategi pembangunan sosial ekonomi merupakan kunci agar pembinaan keluarga tidak hanya idealistik tetapi juga aplikatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. KUA, BKKBN, Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan harus bekerja dalam satu kerangka besar yang sama: memperkuat keluarga Indonesia melalui pembinaan yang berbasis data, nilai agama, dan kebutuhan nyata keluarga. Pembinaan tidak bisa dilakukan hanya pada tahap pra-nikah; perlu dibangun sistem pembinaan berkelanjutan yang mencakup pasca-nikah dan masa parenting. Pemerintah juga perlu memperbaiki

sistem monitoring dan evaluasi agar keberhasilan program dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembinaan keluarga dalam Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas tantangan modern, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan menerjemahkan nilai-nilai spiritual menjadi strategi praktis. Dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, psikologis, dan ekonomi, cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat dicapai secara lebih realistis, sistematis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). *"Marriage Rate Declines in Indonesia Over the Last 10 Years."* 13 November 2024.
- BPS & BKKBN. *"BPS and BKKBN Sign MoU to Strengthen Population and Family Development Data Collaboration."* 25 Juli 2025.
- BKKBN. "BKKBN berhasil mutakhirkan 15,9 juta data keluarga Indonesia." ANTARA News, 8 Agustus 2023.
- BKKBN. "Sukses Implementasikan SIGA, BKKBN Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2023." Kompas, 6 Desember 2023.
- Kementerian Agama. "Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga." Surabaya, 2024.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). "Menteri PPPA Dorong Penguatan Peran Keluarga." Press Release, 18 Juni 2025.